



SALINAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR : 100.1.7/4/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026**

**TENTANG**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA PROBOLINGGO**

**TERHADAP**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)**

**WALI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Pasal 22 Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025, maka perlu melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Probolinggo Tahun 2025 secara internal oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyusun Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Wali Kota Probolinggo;
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan acara Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka perlu menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo terhadap

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2025;
13. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025.

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Probolinggo Nomor: 000.7.5/150/425.001/2026 tanggal 04 Maret 2026 Perihal Penyampaian Dokumen LKPJ dan Nota Penjelasan LKPJ Wali Kota Probolinggo Tahun 2025;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan acara Penyampaian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Nota Penjelasan Wali Kota Probolinggo tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun 2025, tanggal 11 Maret 2026;

3. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo, tanggal 10 Maret 2026;

4. Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo tanggal 08, 13, dan 15 April 2026;

5. Rapat Konsultasi Pimpinan dengan Ketua-Ketua Fraksi membahas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025, tanggal 15 April 2026;

6. Rapat Paripurna Intern dengan acara Penandatanganan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 yang didahului dengan Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo, tanggal 20 April 2026.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU keputusan ini, disampaikan kepada Wali Kota Probolinggo untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo  
pada tanggal : 20 April 2026

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO,**

**ttd**

**DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DPRD  
KOTA PROBOLINGGO,**

**Drs. TEGUH BAGUS S., M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660605 199003 1 015

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR : 100.1.7/4/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026  
TANGGAL : 20 APRIL 2026

---

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO  
TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
WALI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025**

---

Sebagai Penyelenggara Pemerintah di daerah bahwa Kepala Daerah bersama DPRD memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan di daerah dengan memperhatikan isu-isu strategis Daerah, aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, lingkungan yang kondusif, serta didukung ketersediaan dana operasionalnya.

Diawali dengan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kota Probolinggo bersama Ketua-Ketua Fraksi, dan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Probolinggo dengan Eksekutif pada tanggal 10 Maret 2026, selanjutnya berdasarkan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Kota Probolinggo yang telah menjalankan tugasnya melakukan pembahasan pada tanggal 08, 13, dan 15 April 2026, dimana Panitia Khusus telah berupaya semaksimal mungkin melakukan evaluasi, inventarisasi permasalahan yang terjadi serta merumuskan solusi - solusi untuk perbaikan dan penyempurnaan ke depan.

Selanjutnya dari Hasil Kerja Panitia Khusus yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan beberapa saran, masukan dan rekomendasi sebagai berikut :

Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan, serta melalui kajian secara cermat, serta dilandasi dengan ketentuan dasar hukum yang berlaku, maka DPRD Kota Probolinggo berkesimpulan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun 2025 telah sesuai dengan ketentuan teknis Yuridis Peraturan perundangan yang berlaku.

Guna melengkapi Rekomendasi DPRD Kota Probolinggo terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun 2025 ini, perlu disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

#### **A. Secara Umum**

Berdasarkan Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2025 ditetapkan tema Pembangunan: **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Kemandirian Daerah Melalui Penguatan Ekonomi Inklusif Yang Didukung Pemenuhan Infrastruktur”**, Sejauhmana keberhasilannya tentu akan tercermin dalam dokumen LKPJ 2025 ini. Untuk itu beberapa hal yang menjadi pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya (menilai kinerja pemerintah daerah tahun 2025) antara lain :

1. Tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan Daerah hasil PEMILU serentak se Indonesia, hal ini berpengaruh pada perubahan arah dan kebijakan Pembangunan baik tujuan maupun sasaran berdasarkan RPJMD lama ( RPD 2025–2026) ke RPJMD Tahun 2025 – 2029.
2. Dari sisi perencanaan jangka menengah pembangunan, LKPJ Tahun 2025 juga menjadi pembuktian:
  - yang pertama, apakah rumusan Permasalahan dan isu strategis 2025 memang relevan/sesuai kondisi sebenarnya sebagaimana yang dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
  - yang kedua, apakah program unggulan Kepala Daerah efektif sebagai program terobosan (mampu mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran yang di tetapkan dalam RPJMD).

Berdasarkan hal tersebut diatas setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo melakukan kajian hasil Kerja Panitia Khusus terhadap dokumen LKPJ Wali Kota Probolinggo Tahun 2025, dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, dan dokumen Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2025, dapat disampaikan secara umum rekomendasi DPRD Kota Probolinggo sebagai berikut :

## I. TUJUAN

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah, dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi tercatat sebesar 5,68% dari target 6,1%, target daerah tidak terpenuhi akibat indikasi kelesuan di sektor riil, investasi, dan konsumsi rumah tangga. Kondisi tersebut selaras dengan menurunnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) serta memburuknya skor ICOR.

**DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar Pemerintah daerah melakukan identifikasi mendalam terhadap tiga sektor utama penyebab perlambatan (diduga sektor perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan). Selain itu, diperlukan akselerasi belanja modal APBD dan percepatan realisasi investasi untuk memicu kembali pertumbuhan ekonomi.

2. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, peningkatannya setiap tahun masih sangat lamban sampai dengan tahun 2025 IPM Kota Probolinggo capaiannya masih dibawah 80 (sebesar 78,50 dan 77, 79 di tahun 2024) belum mampu menyamai IPM sesuai kota-kota di Jawa Timur, angka tersebut termasuk level terendah rerata kota di Jawa Timur yang sampai 2025 sudah pada level diatas 80, kecuali Kota Pasuruan yang capaian IPM tahun 2025 masih dibawah 80 atau sebesar 79,52.

**DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar Pemerintah Daerah tidak berpuas diri dan tetap melakukan akselerasi melalui fokus pada penurunan angka stunting, peningkatan akses pendidikan anak usia dini (PAUD), serta pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas daya beli.

3. Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan dengan indikator tujuan Persentase Penduduk Miskin mencapai 5,69%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 5,78% (selisih positif 0,09%). Efektivitas program jaring pengaman sosial melalui PKH, BPNT, dan BLT menjadi faktor kunci keberhasilan tersebut. Meski demikian, diperlukan strategi yang lebih spesifik untuk menuntaskan kantong-kantong kemiskinan ekstrem di lapisan desil terendah agar tidak terjadi stagnansi pada kelompok masyarakat paling rentan.



**DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penguatan kolaborasi lintas sektor yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga desil 1(satu). Selain itu, diperlukan optimalisasi verifikasi lapangan pada DTKS secara berkala guna memastikan intervensi kebijakan tetap presisi dan tepat sasaran.

4. Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan dengan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) gagal memenuhi target, di mana realisasi tercatat sebesar 4,93% dari target 3,72% (terdapat deviasi negatif sebesar +1,21%). Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah tercatat positif, hal tersebut belum mampu dikonversi menjadi penyerapan tenaga kerja yang optimal (*jobless growth*). Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) keterampilan, keterbatasan lapangan kerja baru, serta pengaruh digitalisasi dan otomatisasi industri.

**DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap efektivitas program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), optimalisasi bursa kerja, serta penguatan skema Padat Karya Tunai. Selain itu, diperlukan penguatan kemitraan strategis dengan Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) guna menyinkronkan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja terkini.

5. Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan dengan indikator tujuan Indeks Gini tercatat sebesar 0,258, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,295. Meskipun secara administratif capaian ini sangat baik, namun secara teknis ekonomi makro, penurunan drastis dari angka 0,344 (2024) ke 0,258 (2025) dalam kurun satu tahun dinilai anomali jika tidak dibarengi dengan kebijakan redistribusi kekayaan yang masif. Penurunan yang terlalu signifikan ini mengindikasikan adanya kemungkinan perubahan metodologi oleh BPS, baik dari segi keterwakilan sampel, perubahan strata, maupun formulasi penghitungan terbaru yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Menyikapi hal tersebut, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** pihak eksekutif untuk segera berkoordinasi dengan BPS Kota Probolinggo guna melakukan klarifikasi komprehensif dan uji silang terhadap metodologi yang digunakan. Dalam proses klarifikasi tersebut, pemerintah daerah bisa memperoleh rincian data distribusi pendapatan per desil dan membandingkannya secara langsung dengan data penerimaan pajak daerah serta realisasi belanja sosial. Apabila terbukti terjadi kesalahan atau deviasi akibat faktor metodologis, DPRD Kota Probolinggo mendesak agar segera dilakukan koreksi data menuju angka estimasi yang lebih wajar, logis, dan merepresentasikan realitas ekonomi secara akurat.

6. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dengan indikator tujuan Indeks Infrastruktur. pada tahun 2025 tercatat sebesar 76,85, sedikit di bawah target yang ditetapkan yaitu 76,88 (terdapat deviasi sebesar 0,03 poin). Meskipun selisih tersebut sangat tipis, secara administratif capaian ini berstatus "Tidak Tercapai". Kondisi ini mengindikasikan belum adanya perbaikan signifikan pada sub-indeks jalan, air bersih, sanitasi, maupun kelistrikan.

**DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar Pemerintah Daerah memberikan atensi khusus dan memprioritaskan anggaran pada dua sektor krusial, yaitu perluasan akses air minum perpipaan serta penyediaan sarana sanitasi aman.

7. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dengan indikator tujuan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terealisasi sebesar 25,04%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 7%. Meski secara administratif tercapai 358% dari target, DPRD Kota Probolinggo mencatat adanya diskrepansi signifikan antara perencanaan dan realisasi. Target 7% dinilai terlalu rendah (*under-target*) sehingga tidak mampu merepresentasikan upaya penurunan emisi daerah secara progresif dan akurat terhadap baseline.

**DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian target indikator lingkungan hidup pada periode mendatang agar lebih kompetitif dan selaras dengan capaian riil di lapangan. Selain

itu, Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan standarisasi metodologi perhitungan yang baku (tahunan atau kumulatif) guna menjamin konsistensi pelaporan dan validitas data kinerja lingkungan hidup daerah.

8. Mewujudkan Pemerintah yang Adaptif serta Pelayanan Publik Prima berbasis Digital, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, yang ditargetkan di tahun 2025 sebesar 85,94 indeks, dan terealisasi sebesar 86,37 indeks. Berdasarkan analisis hal ini tentu melampaui target yang indikasi keberhasilan bersumber dari implementasi SPBE, Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dan peningkatan pelayanan publik. Namun **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar peningkatan indeks berdampak nyata pada waktu layanan perizinan, pengaduan publik, dan kemudahan berusaha.

## II. SASARAN

1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah, dengan indikator sasaran Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal target sebesar 25% dan realisasi sebesar 2,01%. Berdasarkan analisis realisasi sangat jauh dari target. Target 25% sangat tidak realistis dibanding capaian, dan realisasi 2,01% sebenarnya positif dan membaik dari tahun sebelumnya, akan tetapi target terlalu ambisius.

**DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar dilakukan Evaluasi iklim investasi dan kemudahan perizinan di kota probolinggo.

2. Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah, dengan indikator sasaran :

- a. Persentase PDRB Sektor Perindustrian

Tercatat pencapaian realisasi dari sektor industri tahun 2025 sebesar 5,90%. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 6,16%, dengan selisih (*gap*) sebesar -0,26%. Meskipun kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB hampir mencapai target dan masih menunjukkan tren positif, laju pertumbuhannya mengalami perlambatan. Menindaklanjuti hal tersebut, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar Pemerintah Daerah lebih agresif dalam mendorong

investasi, khususnya pada sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM).

b. Persentase PDRB Sektor Perdagangan

Realisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perdagangan pada tahun 2025 tercapai sebesar 5,29%, atau tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 6,40%. Rendahnya kontribusi ini menunjukkan kelesuan pada sektor perdagangan, yang diduga terdampak oleh inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat. Menyikapi hal tersebut, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pasar rakyat, rantai distribusi barang, serta pengendalian harga kebutuhan pokok.

c. Sasaran Rasio Kewirausahaan

Realisasi sasaran Rasio Kewirausahaan pada tahun 2025 tercapai sebesar 8,42%, hampir memenuhi target yang ditetapkan sebesar 8,77%. Meskipun menunjukkan tren peningkatan, laju pertumbuhannya tergolong sangat lambat, sehingga target jumlah wirausaha belum terpenuhi. Berdasarkan analisis tersebut, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar Pemerintah Daerah terus mengoptimalkan program wirausaha muda, memperluas kemudahan akses permodalan, serta mengintensifkan pelatihan bagi UMKM.

d. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan

Indikator Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 0,76 hari, sehingga tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 0,88 hari. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas wisatawan hanya singgah kurang dari satu hari dan mengindikasikan rendahnya minat wisatawan untuk bermalam. Memperhatikan hal tersebut, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap daya tarik wisata, ketersediaan fasilitas penginapan, serta inovasi paket wisata di Kota Probolinggo.

e. NTP (Nilai Tukar Petani)

Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2025 berhasil terealisasi sebesar 111,58, melampaui target yang ditetapkan sebesar 104. Capaian positif ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli dan kesejahteraan petani secara signifikan. Namun demikian dari capaian kinerja tersebut, **DPRD Kota Probolinggo** tetap memandang perlu memberikan **merekomendasikan** agar capaian ini terus dipertahankan oleh Pemerintah Daerah, khususnya melalui upaya menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani dan menjamin ketersediaan pasokan pupuk.

f. NTN (Nilai Tukar Nelayan)

Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2025 berhasil terealisasi sebesar 97,21, melampaui target yang ditetapkan sebesar 88. Atas capaian positif yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan nelayan ini, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar kinerja tersebut tetap dipertahankan oleh Pemerintah Daerah.

3. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Pangan Daerah, dengan indikator sasaran Indeks Ketahanan Pangan. Tahun 2025 ditargetkan sebesar 73,99 indeks, dan terealisasi sebesar 68,57% atau tidak memenuhi target. DPRD Kota Probolinggo menilai adanya Indikasi kerawanan pangan yang mengalami peningkatan. **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar pemerintah daerah melakukan Audit ketahanan pangan, melakukan evaluasi ketersediaan beras, cadangan pangan daerah, dan stabilitas harga.

4. Meningkatnya Pemenuhan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan, dengan indikator sasaran Indeks Pendidikan, yang ditargetkan di tahun 2025 sebesar 0,703 indeks dan terealisasi sebesar 0,71 indeks. Capaian ini telah melampaui target, Tren positif yang konsisten. **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar capaian ini tetap dipertahankan.

5. Meningkatnya Pemenuhan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, dengan indikator sasaran Indeks Kesehatan, dengan target di tahun 2025 sebesar 0,785 indeks, dan terelisasi sebesar 0,841 indeks. Capaian ini telah melampaui target, dan

**DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar capaian ini tetap dipertahankan.

6. Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan indikaot sasaran:

a. Persentase PMKS

Berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan DPRD Kota Probolinggo, ditemukan bahwa capaian indikator kesejahteraan sosial, khususnya terkait persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), gagal memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat penyimpangan target (*gap*) sebesar +8,458 poin yang menunjukkan terjadinya tren pemburukan kondisi di lapangan.

Secara faktual, persentase PMKS justru mengalami peningkatan yang cukup tajam, yakni dari 42,45% pada tahun 2024 naik menjadi 50,458% pada tahun 2025. Mengingat tingginya angka PMKS berbanding lurus dengan memburuknya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. DPRD Kota Probolinggo menilai hal ini sebagai indikasi kuat bahwa program-program intervensi yang telah dijalankan meliputi program rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial belum berjalan efektif dan tidak berhasil menekan laju pertumbuhan jumlah PMKS.

Menyikapi hal tersebut **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** kepada Pemerintah Daerah beserta dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh program intervensi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Langkah evaluasi ini harus diiringi dengan kewajiban pemutakhiran dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, pemerintah daerah juga diharapkan dapat merumuskan ulang strategi penanganan dan mengoptimalkan serapan anggaran demi mencapai target penurunan angka PMKS menjadi maksimal 40% pada tahun 2026.

b. Indeks Pembangunan Gender

Berdasarkan hasil pencermatan dan evaluasi DPRD Kota Probolinggo, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan 96,78%. Tercatat, angka IPG mengalami peningkatan yang terukur, yakni dari 97,26 pada tahun 2024 menjadi 97,52 pada tahun 2025.

Peningkatan angka IPG ini merupakan representasi nyata dari semakin membaiknya iklim kesetaraan gender di daerah. Capaian ini sekaligus menjadi indikator kuat atas keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas dan menjamin akses perempuan terhadap sektor-sektor esensial, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Guna meningkatkan Pembangunan Gender di kota probolinggo kedepannya **DPRD Kota Probolinggo Merekomendasikan** kepada Pemerintah Daerah untuk terus mempertahankan tren positif tersebut dengan melanjutkan program pengarusutamaan gender, khususnya dalam memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan partisipasi dan representasi mereka di angkatan kerja maupun posisi kepemimpinan yang strategis.

7. Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum Masyarakat, dengan indikator sasaran Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum, tahun 2025 terealisasi sebesar 70,49. Capaian ini berhasil memenuhi target yang ditetapkan secara presisi atau mencapai 100%. **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** kedepannya agar Pemerintah Daerah terus mempertahankan situasi yang kondusif ini melalui penguatan sinergi aparat keamanan (Satpol PP, TNI, dan Polri), optimalisasi deteksi dini terhadap potensi gangguan, serta pendekatan persuasif di tengah masyarakat.

8. Meningkatnya Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan, dengan indikator sasaran:

a. Persentase Ketersediaan Infrastruktur

Tahun 2025 terealisasi sebesar 79,21%. Angka ini berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 78,5%, dengan tingkat capaian target mencapai 101%. Capaian ini tentu berdampak positif, namun **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar Pemerintah Daerah tidak hanya mempertahankan ketersediaan yang ada, tetapi juga memperkuat program pemeliharaan rutin dan peningkatan kualitas infrastruktur agar keberfungsian dapat terus dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

b. Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik

Tahun 2025 terealisasi sebesar 74,48%. Angka ini belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan sebesar 75,27%, dengan tingkat capaian berada di angka 99%. DPRD Kota Probolinggo menilai kinerja pada sektor ini cenderung stagnan, di mana kualitas infrastruktur di Kota Probolinggo belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebagai langkah tindak lanjut, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar Pemerintah Daerah lebih memprioritaskan dan memfokuskan program pada peningkatan standar mutu pembangunan, serta pengoptimalan pemeliharaan jalan dan jembatan agar kualitas infrastruktur tetap terjaga dengan baik.

9. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan indikator sasaran IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), tahun 2025 berhasil terealisasi sebesar 66,58. Angka ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 63,78, capaian ini mengindikasikan perbaikan kualitas ekologi kota Probolinggo. Sebagai langkah tindak lanjut, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar Pemerintah Daerah terus mempertahankan capaian ini melalui penguatan pengawasan terhadap pencemaran air dan udara, pemeliharaan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta optimalisasi pengelolaan persampahan terpadu di Kota Probolinggo.
10. Meningkatnya Mitigasi, Adaptasi dan Ketahanan terhadap Bencana, dengan indikator sasaran Indeks Risiko Bencana pada tahun 2025 terealisasi sebesar 110,66. Capaian ini



tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 93,22 atau dengan tingkat capaian kinerja hanya sebesar 84%. Mengingat IRB merupakan indikator berskala negatif, di mana angka yang lebih tinggi merepresentasikan risiko yang lebih besar. Realisasi ini mengindikasikan tingginya tingkat kerawanan bencana yang belum tertangani secara optimal. Oleh karena itu, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** Pemerintah Daerah meninjau ulang formulasi penetapan target di masa mendatang agar lebih progresif (berorientasi pada penurunan indeks). Selain itu, Pemerintah Daerah perlu segera mengevaluasi efektivitas program mitigasi bencana secara komprehensif, khususnya pada penanganan banjir dan limpasan air laut (rob).

11. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif, dengan indeks sasaran:

a. Nilai SAKIP

Target tahun 2025 sebesar 77 nilai, dengan realisasi sebesar 72,5 nilai. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja saat ini berada di bawah target dengan gap yang cukup signifikan sebesar -4,5%.

**DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** untuk segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap siklus manajemen kinerja, mulai dari sistem perencanaan, akurasi alat ukur, hingga mekanisme pelaporan, guna memitigasi risiko kegagalan target di periode mendatang.

b. Opini BPK terhadap LKPD

Target tahun 2025 opini WTP, dan realisasi capaian di tahun 2025 adalah opini WTP. Capaian ini telah sesuai target, dan DPRD Kota Probolinggo mengapresiasi pencapaian tersebut, dan **Merekomendasikan** agar capaian ini tetap dipertahankan.

c. Level Maturitas SPIP

Target tahun 2025 sebesar 3 kategori, dan capaian realisasi 3 kategori. Capaian ini telah terpenuhi, dan DPRD Kota Probolinggo **Merekomendasikan** agar capaian ini tetap dipertahankan, dan perlu peningkatan target pada periode kedepan sebesar 3,5 kategori.

d. Indeks SPBE

Target tahun 2025 sebesar 3,2 indeks, dan terealisasi 4,04 indeks. Capaian ini telah melampaui target, dan DPRD Kota Probolinggo **Merekomendasikan** agar capaian ini tetap dipertahankan.

e. Indeks Sistem Merit

Realisasi Indeks Sistem Merit pada tahun 2025 tercatat realisasi sebesar 303 poin dari target yang ditetapkan sebesar 318 poin, atau mencapai 95%. dengan gap sebesar -15 poin dari target tahun berjalan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa instrumen penguatan manajemen ASN belum berjalan optimal secara substantif. Oleh karena itu, **DPRD Kota Probolinggo Merekomendasikan** kepada Pemerintah Daerah melakukan evaluasi mendalam terhadap siklus rekrutmen, objektivitas promosi, dan efektivitas sistem penilaian kinerja ASN. Mengingat tren stagnasi yang terjadi, penetapan target tahun 2026 sebesar 310 poin dinilai lebih realistis dan terukur guna memastikan adanya ruang perbaikan yang berkelanjutan.

f. Indeks Inovasi Daerah

Realisasi Indeks Inovasi Daerah Kota Probolinggo pada tahun 2025 tercatat sangat memuaskan dengan raihan 79,02 poin. Angka ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 67,75 poin dengan tingkat capaian mencapai 117%.

Dalam rangka menjaga momentum kemajuan kota probolinggo, **DPRD Kota Probolinggo** perlu memberikan **rekomendasi** agar Pemerintah Kota Probolinggo menaikkan target kinerja pada tahun 2026 menjadi 82 poin. Selain peningkatan target angka, diharapkan adanya penguatan pada kualitas inovasi yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif.

12. Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis integrasi TIK dengan indeks sasaran Indeks Pelayanan Publik menunjukkan performa yang sangat

impresif. Pada tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik (IPP) berhasil terealisasi sebesar 4,47, melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,83 dengan tingkat capaian mencapai 117%.

DPRD Kota Probolinggo menilai pelampauan target ini sebagai representasi nyata dari meningkatnya kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap kemudahan akses layanan pemerintah. Sebagai langkah progresif, **DPRD Kota Probolinggo Merekomendasikan** guna mendukung pencapaian tersebut, Pemerintah Kota diharapkan tidak hanya fokus pada digitalisasi, tetapi juga pada penguatan integrasi data antar-perangkat daerah dan peningkatan kompetensi SDM pelayanan agar standar mutu tetap terjaga di seluruh unit layanan.

## **B. Sesuai Urusan**

Menindaklanjuti proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun 2025 yang telah dilaksanakan secara intensif oleh Panitia Khusus DPRD Kota Probolinggo bersama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, dengan mengacu pada hasil evaluasi, sinkronisasi data, dan inventarisasi permasalahan selama proses pembahasan. DPRD Kota Probolinggo telah merumuskan sejumlah catatan evaluasi kinerja di beberapa Organisasi Perangkat Daerah, guna menyempurnakan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah di masa mendatang, DPRD Kota Probolinggo menyampaikan rekomendasi dan masukan konstruktif bagi Pemerintah Kota Probolinggo, sebagai berikut :

### **1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- a. DPRD Kota Probolinggo menyoroti rendahnya serapan target fisik seragam sekolah yang realisasi hanya 700 dari 1.000 siswa SD dan 432 dari 1.150 siswa SMP yang seharusnya dapat dimaksimalkan melalui kebijakan yang bersifat inovatif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Masih terdapat 47 lokasi gedung sekolah yang mengalami kerusakan dengan kategori sedang hingga berat, **DPRD Kota Probolinggo Merekomendasikan** dinas terkait untuk

melakukan percepatan rehabilitasi melalui APBD TA 2026 maupun dana revitalisasi pusat.

- c. Maraknya perundungan dilingkungan sekolah di Kota Probolinggo, maka **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** agar membentuk kegiatan program pendampingan sebagai antisipasi/pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi yang terjadi dilingkungan sekolah.
- d. Meskipun kampanye *city branding* 'Probolinggo Kota Bersolek' telah menunjukkan indikasi keberhasilan awal, terdapat anomali data pendidikan yang memerlukan perhatian serius. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) saat ini tercatat di angka 9,73 tahun (setara SMP), yang sangat kontradiktif dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang dipatok pemerintah sebesar 13,99 tahun (setara Diploma). Berdasarkan validasi data, ditemukan 1.885 Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dikategorikan sebagai *Drop Out*, Belum Pernah Bersekolah (BPB), dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM). Menanggapi hal ini, DPRD Kota Probolinggo mengapresiasi inovasi 'Gerakan Sahabat ATS' melalui sinergi berbasis area terpadu yang menerjunkan tutor di 29 kelurahan. **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** agar inovasi ini dilaksanakan secara konsisten dan terukur sebagai solusi strategis untuk mengatasi kesenjangan pendidikan sekaligus determinan utama dalam kenaikan IPM Kota Probolinggo Kota Probolinggo.
- e. Mengingat peran strategis Dewan Pendidikan dalam memberikan pertimbangan, dukungan, serta pengawasan terhadap kebijakan pendidikan, DPRD Kota Probolinggo memandang perlunya penguatan struktur organisasi tersebut. **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** untuk dilakukannya reformasi melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini penting dilakukan guna memastikan personalia yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas tinggi, sehingga Dewan Pendidikan dapat melahirkan inovasi kebijakan yang relevan serta menjalankan fungsi pengawasan secara objektif demi kemajuan kualitas pendidikan di Kota Probolinggo.

- f. Bahwa dalam hal penggabungan urusan pendidikan dengan kebudayaan, ini dinilai terlalu dipaksakan. Karena Orientasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2025 adalah berorientasi pada pelestarian budaya sekaligus menambah destinasi wisata. Seharusnya jika memang kebudayaan berada di bawah satu payung dengan pendidikan maka orientasinya adalah bagaimana menanamkan kebudayaan-kebudayaan yang mendasar. **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** agar perlu dikaji ulang terhadap urusan kebudayaan yang menjadi satu urusan di Dinas Pendidikan supaya dialihkan menjadi satu di Dinas Pariwisata. Sehingga nilai-nilai kebudayaan dapat mendukung sektor kepariwisataan yang ada di Kota Probolinggo.

## 2. DINAS KESEHATAN

- a. Terkait adanya sisa anggaran belanja pegawai pada Dinas Kesehatan sebesar Rp. 4,4 miliar yang utamanya disebabkan oleh fluktuasi Jasa Pelayanan akibat ketergantungan pada jumlah kunjungan pasien. DPRD Kota Probolinggo memandang perlunya langkah-langkah akseleratif. **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** supaya Dinas Kesehatan menyusun strategi komprehensif dalam optimalisasi mutu layanan guna meningkatkan utilisasi fasilitas kesehatan oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan sistem rujukan terintegrasi serta komunikasi intensif antar-fasilitas kesehatan (Puskesmas ke RSUD) agar distribusi pelayanan lebih merata dan berdampak positif pada stabilitas pendapatan jasa pelayanan.
- b. Program kegiatan Pemerintah Daerah di tahun 2025 khususnya di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih banyak program yang realisasinya dibawah standart seperti program peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diperuntukan untuk pelatihan/peningkatan kapasitas tenaga kerja, maka **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** agar dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB mengevaluasi perencanaan programnya agar program dimaksud bisa dilaksanakan demi pelayanan secara maksimal.

- c. DPRD Kota Probolinggo memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan antara capaian kinerja fisik dan realisasi anggaran pada sejumlah program krusial pada Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan KB, seperti penanganan TBC, HIV-AIDS, Kejadian Luar Biasa (KLB), dan Gizi Masyarakat, yang tercatat masih di bawah 60%. Meski target jumlah masyarakat yang dilayani telah tercapai, rendahnya penyerapan anggaran ini mengindikasikan adanya potensi ketidakefisienan dalam perencanaan atau kurangnya optimalisasi kualitas intervensi di lapangan.

**DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan evaluasi mendalam terhadap struktur belanja program tersebut. Kedepan, penyerapan anggaran harus dilakukan secara lebih intensif, konsisten, dan berkualitas, guna memastikan bahwa pencapaian target tidak sekadar memenuhi kuantitas administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka penderita dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- d. Disebutkan bahwa Fungsi *Universal Health Coverage* (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta adalah sistem yang menjamin seluruh penduduk memiliki akses adil ke pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau tanpa kendala finansial. Program tersebut menjadi salah satu wujud nyata kepedulian pemerintah dalam menjamin kesehatan seluruh masyarakat khususnya di Kota Probolinggo. Namun dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas-puskesmas yang ada di kota probolinggo, banyak pasien yang ditolak karena kartu BPJS belum diaktivasi. Maka **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan perlu memfasilitasi pasien melalui puskesmas-puskesmas agar dipermudah dalam pengurusan administrasi. Selain itu, Dinas Kesehatan perlu bersinegi dengan sektor terkait agar memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kesehatan.
- e. Berkaitan dengan adanya rumah singgah yang saat ini berada di 3 (tiga) kota/kabupaten yakni Jember, Malang dan

Surabaya. Bahwa saat ini pasien tidak hanya dirujuk pada rumah sakit yang berada di 3 (tiga) kota/kabupaten tersebut. Akan tetapi terdapat pula pasien yang dirujuk ke Sidoarjo. Menyikapi hal ini **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** perlu menganggarkan pembangunan rumah singgah yang ada di Sidoarjo.

- f. Terkait realisasi anggaran belanja secara agregat yang telah mencapai 91,51%, DPRD Kota Probolinggo mencatat masih terdapat beberapa jenis belanja tertentu dengan capaian di bawah 90%. Berdasarkan hasil evaluasi, rendahnya penyerapan tersebut disebabkan oleh sisa stok yang dinilai masih mencukupi kebutuhan operasional.

Atas temuan tersebut, **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** agar Pemerintah Daerah melakukan perencanaan anggaran yang lebih presisi, detail, dan berbasis kebutuhan nyata (*needs-based budgeting*). Hal ini penting guna meminimalisir terjadinya penumpukan stok (*overstock*) dan memastikan alokasi anggaran dapat diserap secara maksimal serta tepat sasaran pada setiap jenis belanja.

### 3. RSUD Dr. MOH SALEH

- a. DPRD Kota Probolinggo mengidentifikasi adanya tantangan berupa penurunan kunjungan pasien akibat kebijakan pembatasan rujukan BPJS bagi kasus non-gawat darurat, serta meningkatnya kompetensi rumah sakit swasta di wilayah sekitar. Namun, DPRD Kota Probolinggo menegaskan agar RSUD dr. Moh. Saleh tetap optimis dalam memperkuat daya saing dan layanan unggulan.

Ke depan, penguatan infrastruktur melalui peningkatan kapasitas ruang operasi (OK) dari 3 menjadi 5 unit, serta akselerasi layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uro-Nefrologi) harus menjadi prioritas utama. Dengan dukungan dokter spesialis dan rencana operasional alat kesehatan mutakhir seperti Cat Lab bantuan dari Kemenkes pada Juli/Agustus 2026, RSUD diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat rujukan utama yang mandiri dan kompetitif di Kota Probolinggo.

- b. Pengadaan yang tidak bisa terlaksana pada Tahun Anggaran 2025 seperti Pengadaan Hidran, Mesin Cuci dan Alat Kesehatan yang disebabkan karena kurangnya waktu, gagal tender, dan masalah ekatalok, **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** RSUD Dr. Moh. Saleh seharusnya lebih cepat tanggap dan komunikasi langsung dengan bagian Barang dan Jasa agar kegiatan pengadaan tersebut bisa terlaksana/terrealisasi.

#### **4. RSUD Ar-Rozy**

- a. Adanya penarikan anggaran pembangunan yang diperuntukan bagi pembangunan ruang maternal di tahun anggaran 2025 dan akan dianggarkan kembali di tahun 2026 yang beresiko terulang jika ada *refocusing* lagi, Maka **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** perlu keberanian dan kemauan dari kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, meskipun ada keterbatasan anggaran daerah dan aturan terkait pada dinas/RS dalam mengelola pembangunan sendiri.
- b. Dalam upaya optimalisasi sarana dan prasarana penunjang di RSUD Ar Rozy, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar manajemen rumah sakit segera melakukan koordinasi dan konsultasi intensif dengan sektor terkait guna pengadaan serta perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di area sekitar rumah sakit. Hal ini penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, serta kemudahan aksesibilitas bagi pasien dan masyarakat, terutama pada waktu malam hari.
- c. Berkaitan dengan tersampainya media informasi yang ada di RS Ar Rozy. **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** agar mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Videotron.
- d. Berkaitan dengan tertundanya pembayaran klaim BPJS. Hal ini disebabkan karena kurang profesionalnya SDM tentang pemahaman atau aturan persyaratan klaim BPJS. Sehingga berdampak pada manajemen keuangan RSUD. Menyikapi hal ini **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** agar meningkatkan kualitas SDM di RSUD. Sehingga tidak terdapat lagi klaim-klaim yang kemudian tertunda.



## 5. PUPR dan PERKIM

- a. DPRD Kota Probolinggo mencatat rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Retribusi Pemakaian Laboratorium dan Alat, yang utamanya disebabkan oleh tingginya penggunaan alat untuk kepentingan sosial masyarakat tanpa pengenaan biaya. Guna mengompensasi hal tersebut dan memperkuat fiskal daerah, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** akselerasi target PAD pada tahun 2026 melalui diversifikasi sumber pendapatan baru. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan aset daerah, khususnya melalui retribusi pemakaian ruang dan bagian jalan dengan target pendapatan sebesar Rp. 2 miliar, guna memastikan kontribusi PAD tetap tumbuh secara signifikan dan berkelanjutan.
- b. Banyaknya putus kontrak proyek pembangunan yang disebabkan ketidakmampuan keuangan penyedia, Maka **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** Dinas PUPR dan PERKIM mengusulkan Perwali terkait persyaratan kemampuan keuangan kontraktor.
- c. Memperhatikan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar pada Bidang Perkim dan Sumber Daya Air, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar Dinas PUPR mengoptimalkan pelaksanaan program melalui mekanisme swakelola. Langkah ini dipandang sebagai solusi responsif untuk menangani kendala teknis di lapangan yang memerlukan penanganan cepat.
- d. Mengingat alokasi anggaran pemeliharaan rutin pada tahun 2026 mengalami penurunan drastic, di mana anggaran pemeliharaan jalan sebesar Rp. 300 juta telah terserap sepenuhnya pada bulan Maret 2026. **DPRD Kota Probolinggo mendesak** Dinas PUPR untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Koordinasi ini bertujuan untuk melakukan realokasi atau penambahan anggaran swakelola guna memastikan keberlanjutan pelayanan publik dan pemeliharaan infrastruktur di Kota Probolinggo hingga akhir tahun anggaran.

## 6. SATPOL PP

- a. rendahnya realisasi program penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang hanya mencapai 43,46% pada Tahun Anggaran 2025. Mengingat kendala utama bersumber dari hambatan administratif pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** adanya sinkronisasi regulasi dan percepatan prosedur administratif agar di masa mendatang kendala teknis serupa tidak menghambat efektivitas penegakan supremasi hukum di daerah.
- b. Terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan kendaraan dari luar daerah di zona terlarang, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** dilakukannya langkah penertiban secara kolaboratif. Sinergitas antara Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Satlantas Polres Probolinggo perlu diperkuat melalui pendekatan yang humanis namun tetap tegas, guna menjamin kelancaran arus lalu lintas serta kepatuhan terhadap regulasi tata ruang kota.
- c. Menyikapi meningkatnya gangguan ketertiban umum berupa kerumunan pemuda yang terindikasi mengonsumsi minuman keras di area minim penerangan, khususnya di kawasan Bundaran Serang, **DPRD Kota Probolinggo memberikan dukungan** penuh terhadap usulan pemberlakuan jam operasional malam atau pembatasan waktu penggunaan fasilitas umum. Langkah preventif ini perlu segera diimplementasikan pada titik-titik rawan guna meminimalisir potensi tindak kriminalitas serta menjaga kondusivitas wilayah Kota Probolinggo.
- d. DPRD Kota Probolinggo memberikan apresiasi tinggi atas capaian kinerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kota Probolinggo. Keberhasilan dalam meminimalkan angka kejadian kebakaran di wilayah perkotaan dinilai sebagai dampak positif dari pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan dini yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat.

## 7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- a. DPRD Kota Probolinggo menilai pengelolaan situs web dan media online BPBD Kota Probolinggo saat ini belum berjalan optimal, yang berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan kebencanaan. Guna mengatasi hambatan komunikasi tersebut, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** BPBD untuk segera melakukan revitalisasi kanal informasi digital serta penyederhanaan mekanisme pelaporan bencana. Hal ini penting dilakukan agar akses informasi lebih terbuka dan sistem pelaporan menjadi lebih responsif, sehingga masyarakat dapat melaporkan kejadian bencana secara cepat, mudah, dan terintegrasi.
- b. Berdasarkan kondisi kelayakan sarana dan prasarana pada BPBD, DPRD Kota Probolinggo menilai bahwa kondisi gudang penyimpanan saat ini telah mengalami overkapasitas. Akibat keterbatasan ruang tersebut, berbagai logistik esensial mulai dari bahan makanan, obat-obatan, hingga peralatan berat seperti tenda terpaksa diletakkan di area terbuka, sehingga sangat rentan mengalami kerusakan akibat cuaca. Menyikapi hal tersebut, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya untuk pengadaan atau pembangunan fasilitas gudang baru yang lebih memadai.
- c. DPRD Kota Probolinggo menyoroti rendahnya capaian program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) pada Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada minimnya intensitas sosialisasi kepada masyarakat. Dari target awal pembentukan di 4 (empat) kelurahan dengan pembangunan 6 (enam) sumur resapan, realisasinya hanya menyentuh 2 (dua) kelurahan dengan alokasi 4 (empat) sumur resapan. Kendala ini dipicu oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menghambat pemenuhan target fisik dan edukasi kebencanaan. Atas kondisi tersebut, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** penambahan alokasi anggaran pada tahun berjalan (2026) guna menjamin keberlanjutan program Keltana secara menyeluruh di

seluruh kelurahan terdampak, demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di Kota Probolinggo.

#### **8. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- a. Menanggapi apa yang dipaparkan oleh kepala Dinsos terkait realisasi anggaran yang minim pada program kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Maka **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** Dinsos perlu mengajukan tambahan anggaran pada program kegiatan tersebut, karena dirasa tidak cukup untuk mengcover seluruh PMKS di Kota Probolinggo.
- b. Dengan banyaknya program PKK yang dicantumkan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinsos) yang seharusnya dibawah urusan pemberdayaan masyarakat, Maka **DPRD Kota Probolinggo berharap** tidak mengganggu program inti pada Dinsos.
- c. Anggaran Bansos yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 900 Juta yang diperuntukan untuk rantang sehat, sembako fakir miskin dan alat bantu sangat minim untuk kegiatan tersebut, Maka **DPRD Kota Probolinggo mengusulkan** perlu penambahan alokasi DAU untuk Bansos di Tahun Anggaran berikutnya sebagai solusi bagi masyarakat yang tidak tercover bantuan lain.

#### **9. DPMPTSP**

- a. Menindaklanjuti *Legal Opinion* (LO) dari Kejaksaan Negeri terkait penghentian perpanjangan izin baliho di jalan raya yang berisiko secara struktur, DPRD Kota Probolinggo menegaskan agar DPMPTSP tetap berpegang teguh pada prosedur perizinan yang berlaku. **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** agar penataan reklame dilakukan secara selektif dengan mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta standar teknis keamanan bangunan. Hal ini diperlukan guna memastikan bahwa upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek keselamatan publik dan estetika kota.

- b. Terkait implementasi Proyek Koperasi Merah Putih (KMP) di tingkat kelurahan, DPRD Kota Probolinggo menemukan fakta bahwa 10 lokasi KMP menggunakan lahan aset daerah berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Mengingat bangunan-bangunan tersebut telah berdiri tanpa kelengkapan izin yang sah, **DPRD Kota Probolinggo mendesak** DPMPTSP untuk segera mengambil tindakan tegas sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini penting guna menegakkan kepatuhan terhadap tata ruang dan memastikan bahwa setiap pemanfaatan aset daerah tetap berlandaskan pada prinsip legalitas yang utuh.

#### **10. DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN**

- a. DPRD Kota Probolinggo mencatat terjadinya penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Sewa Barang Milik Daerah (BMD). Kondisi ini merupakan dampak dari skema pembayaran di muka secara multi-tahun pada objek strategis seperti pabrik es, tambak, dan cold storage. Menindaklanjuti adanya perubahan klasifikasi sewa menjadi retribusi berdasarkan regulasi terbaru, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** Pemerintah Daerah untuk segera melakukan kajian mendalam terhadap penyesuaian tarif. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa struktur tarif yang baru tetap kompetitif dan mencerminkan nilai wajar, sehingga mampu mengoptimalkan kontribusi PAD di masa mendatang.
- b. Pasca-wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), DPRD Kota Probolinggo mengapresiasi upaya pemulihan populasi kambing dan domba melalui program Inseminasi Buatan (IB) serta vaksinasi berkelanjutan. Guna menjaga keberlanjutan tren positif tersebut, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** penguatan program pemberdayaan peternak secara terpadu serta optimalisasi manajemen pasar hewan khusus kambing dan domba. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjamin stabilitas populasi ternak, tetapi juga menjadi pendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan sarana perdagangan hewan yang lebih modern dan profesional.

- c. DPRD Kota Probolinggo menekankan agar DKP3 tidak hanya berfokus pada capaian realisasi anggaran secara administratif, tetapi wajib memprioritaskan orientasi hasil (*outcome*) serta dampak nyata bagi masyarakat. Parameter keberhasilan program harus diukur melalui indikator peningkatan volume produksi pertanian/peternakan, efisiensi biaya produksi, serta kenaikan pendapatan riil masyarakat. Selain itu, DPRD Kota Probolinggo mendorong modernisasi fasilitas di pasar hewan guna menstimulasi aktivitas niaga dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, sehingga pasar hewan dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi yang lebih produktif.
- d. DPRD Kota Probolinggo menegaskan pentingnya evaluasi program secara berkelanjutan sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi belanja serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Program-program pemerintah harus dikonstruksikan dengan orientasi pada dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan inovatif yang berbasis pada indikator kinerja yang terukur (*output* dan *outcome*).

## 11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- a. Program *Stand Board* di Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di beberapa titik di kota probolinggo tahun 2025, ternyata tidak sesuai harapan dari pemerintah dan masyarakat, disamping tidak laku, penyebab lainnya adalah kurang pahamnya pemerintah terhadap RTH itu sendiri, untuk itu DPRD Kota Probolinggo menganggap bahwa pemerintah lalai dalam penerapan kebijakan program tentang keberadaan dan status RTH, serta keberadaan *stand board* dimaksud harus di evaluasi secara total dan menyeluruh di semua titik RTH yang ada di Kota Probolinggo.
- b. Terkait tertundanya pengadaan armada roda tiga pengangkut sampah akibat adanya proses pendampingan hukum dari Kejaksaan serta dinamika mutasi staf, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar pelaksanaan yang direncanakan pada April-Agustus ini dibarengi dengan evaluasi kebijakan. DPRD Kota Probolinggo menyarankan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengkaji ulang skema pendistribusian armada secara langsung kepada masyarakat, dengan mewajibkan adanya pelatihan pemilahan sampah. Hal ini penting agar bantuan sarana tersebut tidak hanya bersifat hibah barang, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

## **12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

- a. Realisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang baru mencapai 14%, **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** agar lebih ditingkatkan secara masif, mengingat IKD dimaksud menjadi pilar transformasi layanan publik masa depan.
- b. **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** agar dilakukan peremajaan alat perekaman data yang telah melewati masa pakai teknis guna menjamin kelancaran pelayanan di tingkat Kecamatan maupun Dinas.

## **13. DINAS PERHUBUNGAN**

- a. DPRD Kota Probolinggo mencatat bahwa target pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) belum dapat tercapai secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh tingginya volume kerusakan di lapangan yang tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran serta keterbatasan sarana pendukung. **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** adanya evaluasi menyeluruh terhadap strategi pemeliharaan rutin agar rasio kecukupan infrastruktur penerangan dapat tetap terjaga demi keamanan dan kenyamanan Masyarakat.
- b. Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan adanya evaluasi kinerja juru parkir secara menyeluruh, khususnya dalam implementasi sistem pembayaran non-tunai (e-parkir). Guna meminimalisir potensi kebocoran retribusi, DPRD Kota Probolinggo mendorong Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan pemasangan portal parkir otomatis di titik-titik strategis. Langkah digitalisasi dan penataan infrastruktur ini diharapkan dapat menciptakan sistem pemungutan yang lebih transparan, akuntabel, dan terukur.

- c. DPRD Kota Probolinggo menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi intensif dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan pemangkasan pohon secara berkala. Langkah ini krusial guna memastikan dahan atau ranting pohon tidak menghalangi jarak pandang rambu lalu lintas maupun efektivitas cahaya Penerangan Jalan Umum (PJU), demi menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
- d. DPRD Kota Probolinggo memberikan perhatian serius terhadap maraknya aktivitas parkir liar kendaraan bertonase besar (truk) di sepanjang Jalan Brantas dan Jalan Anggrek. Terkait hal tersebut, **DPRD Kota Probolinggo mendesak** Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera mengambil langkah tegas melalui pemberian surat peringatan kepada pemilik usaha terkait. Selain itu, diperlukan koordinasi intensif dengan Satlantas Polres Probolinggo guna melakukan penertiban secara terpadu demi menjaga kelancaran arus lalu lintas dan mencegah kerusakan infrastruktur jalan.

#### **14. DINAS KOMINFO**

- a. Pasca insiden peretasan pada salah satu situs OPD, DPRD Kota Probolinggo menegaskan agar seluruh sistem elektronik wajib terintegrasi dengan *Firewall* dan SSL yang dikelola Diskominfo, selain itu tidak boleh ada Perangkat Daerah yang berjalan dengan server mandiri tanpa standar keamanan pusat.
- b. Mencermati rendahnya realisasi PAD dari sektor iklan radio yang hanya mencapai 63,56%, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan dilakukannya diversifikasi sumber pendapatan melalui program yang lebih inovatif. DPRD Kota Probolinggo menyarankan agar orientasi promosi mulai dialihkan pada optimalisasi videotron dan produksi konten digital kreatif. Langkah transformasi digital ini dinilai sangat krusial untuk memperluas jangkauan pasar, khususnya pada segmen Gen Z, guna mendongkrak kembali capaian PAD secara signifikan.
- c. Dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan dasar, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar



alokasi anggaran pada tahun mendatang difokuskan secara prioritas pada rehabilitasi gedung sekolah dan revitalisasi fasilitas publik yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Langkah ini krusial untuk memastikan standar pelayanan minimal terpenuhi serta menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan aksesibel bagi seluruh warga Kota Probolinggo.

#### **15. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Dalam upaya menekan tingkat pengangguran di Kota Probolinggo secara signifikan, DPRD Kota Probolinggo mendorong Disperinaker untuk melakukan diversifikasi program di luar penyelenggaraan *Job Fair*. **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar Disperinaker melakukan audit dan sinkronisasi data ketenagakerjaan pada seluruh perusahaan di wilayah Kota Probolinggo.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dengan target minimal 70%. Hal tersebut krusial dilakukan guna memitigasi risiko pergantian tenaga kerja eksisting dengan rekrutmen dari luar daerah, sehingga pertumbuhan industri dapat dirasakan langsung dampaknya oleh warga lokal.

#### **16. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

- a. Terkait kendala pengelolaan Dana Bergulir dan tingginya angka kredit macet pada Bank Jatim serta BPR Jatim yang telah dihentikan operasionalnya sejak tahun 2020, DPRD Kota Probolinggo memberikan perhatian serius pada dana yang terhenti sebesar Rp4,155 miliar. **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** Pemerintah Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah legalitas dan koordinasi perbankan guna mencairkan dana yang dibekukan tersebut. Selanjutnya, anggaran tersebut dapat dialihkan secara produktif untuk mendanai program pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik lainnya yang lebih mendesak bagi masyarakat.

- b. Terkait relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari Alun-Alun ke Pusat Kuliner GOR Ahmad Yani, DPRD Kota Probolinggo mencatat adanya tantangan signifikan berupa penurunan daya saing pedagang di lokasi baru. Guna mengatasi hal tersebut, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** pemerintah daerah untuk melakukan penataan ulang aksesibilitas, optimalisasi kantong parkir, serta kurasi jenis kuliner yang lebih variatif dan menarik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kawasan GOR Ahmad Yani sebagai destinasi kuliner unggulan yang mampu menghidupkan kembali omzet para pedagang.
- c. DPRD Kota Probolinggo memberikan perhatian serius terhadap penurunan realisasi pendapatan pada Pasar Gotong Royong dan Probolinggo Plaza. Kondisi ini dipicu oleh maraknya aktivitas PKL ilegal di area sekitar yang menghambat ketertiban, serta tingginya kendala dalam pemungutan retribusi pasar.

Terkait pemanfaatan aset oleh pihak ketiga, DPRD Kota Probolinggo menyoroti adanya wanprestasi oleh PT. AMKO di Probolinggo Plaza yang belum memenuhi kewajiban pembayaran kontribusi selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Atas hal tersebut, DPRD Kota Probolinggo mendesak Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi kontrak kerja sama serta mengambil langkah hukum yang tegas guna mengamankan potensi pendapatan daerah.

## **17. DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**

- a. **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** pergeseran orientasi pembangunan pariwisata dari sekadar kuantitas kunjungan menjadi peningkatan lama hunian (length of stay) wisatawan. Strategi ini krusial untuk mendongkrak PAD secara signifikan melalui pajak hotel dan restoran. Selain itu, diperlukan akselerasi promosi investasi di sektor pariwisata guna menciptakan ekosistem destinasi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
- b. DPRD Kota Probolinggo mendesak optimalisasi pemanfaatan aset daerah, khususnya GOR Ahmad Yani dan fasilitas olahraga lainnya, melalui evaluasi mendalam terhadap program-program yang dinilai kurang efektif pada

tahun-tahun sebelumnya. Terkait Pusat Kuliner GOR Ahmad Yani, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** Dispopar untuk segera melakukan peningkatan fasilitas (seperti peneduh dan wahana permainan anak) serta penambahan inovasi daya tarik visual (spot foto dan pencahayaan). Guna menjamin keberlanjutan UMKM, Dispopar perlu menginisiasi kegiatan tematik secara rutin, termasuk penyelenggaraan hiburan musik gratis sebagai stimulus untuk meningkatkan trafik pengunjung setiap harinya.

#### **18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Guna mempertahankan predikat dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), **DPRD Kota Probolinggo mendukung** penyediaan Depo Arsip yang representatif dan sesuai standar kearsipan nasional bersifat mendesak.

#### **19. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

Bahwa berdasarkan evaluasi lapangan, masih terdapat peningkatan persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Probolinggo yang memerlukan pendampingan hukum secara profesional, maka **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** kepada Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bagian Hukum untuk memasukkan kembali alokasi anggaran proporsional pada Program Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin ke dalam rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, mengingat program dimaksud saat ini tidak terakomodir pada APBD Tahun 2026.

#### **20. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

a. Terkait adanya sisa anggaran yang tidak terserap akibat efisiensi serta perubahan nomenklatur pada Peraturan Wali Kota (Perwali) yang menetapkan bahwa Pondok Pesantren tidak lagi diklasifikasikan sebagai tempat ibadah, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** Bagian Kesra untuk segera melakukan evaluasi komprehensif.

DPRD Kota Probolinggo meminta dilakukannya verifikasi faktual terhadap yayasan dan organisasi keagamaan penerima bantuan guna mencegah terjadinya ketidaktepatan

sasaran (seperti penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi di kediaman pengurus atau lingkungan sekolah). Hal ini krusial untuk memastikan akuntabilitas belanja daerah serta mencegah terjadinya penurunan alokasi anggaran yang tidak proporsional pada sisa tahun anggaran 2026.

- b. Dengan banyaknya 1089 lebih guru TPQ yang dikelola melalui LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) di setiap kecamatan, **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** Bagian Kesra perlu melakukan Monev (Monitoring dan Evaluasi) dan persyaratan sertifikasi pengajar supaya lebih tepat sasaran.

## **21. BAGIAN BARANG DAN JASA**

- a. Demi mengoptimalkan pelelangan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** perbaikan kedepan terkait anggaran peningkatan kapasitas SDM (Bimtek) yang diperuntukan untuk PPBJ guna meningkatkan keahlian tim dalam pemilihan penyedia.
- b. Pada tahun anggaran 2025, banyak pekerjaan tender/lelang yang tidak mencapai target waktu yang ditentukan dan mengakibatkan pekerjaan putus di tengah kontrak, **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** Bagian Barang dan Jasa harus lebih selektif untuk memilih penyedia Pelaksana, Perencanaan maupun Pengawasannya dan harus berkomitmen 100% tender selesai sesuai kontrak.

## **22. BAPPEDA DAN LITBANG**

- a. Banyaknya usulan Inovasi Daerah (misal 2.300 dari Dinas Pendidikan) yang belum Matang atau belum Terakomodir di aplikasi Kemendagri, **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** agar Bapperida segera mencari Solusi dengan konsultasi ke Kemendagri dan Bappeda Provinsi untuk dilakukan pendampingan, karena Inovasi tersebut perlu klarifikasi demi penyempurnaan.
- b. Koordinasi dengan Kementrian Hukum itu sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran, dan langkah-langkah terkait hak paten Inovasi Daerah (misal Batik Tempur) agar mendapatkan hak cipta dan royalty.

## **23. BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

BPKAD terlalu fokus pada penganggaran, mengabaikan peningkatan PAD, aspek pengelolaan dan optimalisasi aset. Misi BPKAD (birokrasi adaptif) tidak tercermin secara konkret dalam program anggaran.

### **a. Peningkatan PAD:**

- Retribusi Belum Optimal: Realisasi retribusi yang di bawah target menunjukkan kurangnya upaya. Disarankan target dinaikkan hingga 150%.
- Potensi Pendapatan Belum Tergali: Pos "Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah" yang kosong mengindikasikan banyak potensi yang belum diidentifikasi (misal: parkir, rekomendasi dari OPD lain).
- Pajak Air Bawah Tanah (ABT): Belum maksimal karena masalah perizinan provinsi, perhitungan tanpa flowmeter, dan kurangnya koordinasi data perusahaan pengguna ABT.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Banyak sertifikat masih atas nama pemilik lama, menyebabkan tunggakan dan kesulitan saat balik nama.
- Pajak Parkir: Sistem elektronik tidak berfungsi atau belum diterapkan secara luas (contoh: Wismi, Kraton, Sam Studio). Sistem manual (porporasi) rentan kebocoran dan pengawasan yang tidak efektif. Perlu penegakan Perwali 71-2024 tentang parkir elektronik bagi omset di atas Rp. 45 juta.

### **b. Pengelolaan Aset Daerah:**

- Kurangnya data validasi aset, sertifikat tanah yang legal, dan pemanfaatan aset untuk PAD.
- Perlu dashboard pengelolaan aset yang transparan untuk menilai keberhasilan pemerintah.
- Permasalahan tunggakan sewa aset pemerintah dan praktik pembayaran mundur.
- Aset strategis di pinggir jalan seharusnya disewakan untuk PAD, bukan digunakan sebagai kantor.

### **c. Terkait Peningkatan Pendapatan:**

- ABT: Koordinasi dengan DLH dan Disnaker untuk pendataan perusahaan pengguna ABT.

- PBB: Melakukan inovasi balik nama SPPT langsung setelah validasi BPHTB untuk mengatasi masalah kepemilikan. Mengatasi tunggakan PBB lama yang membebani pembeli baru.
- Sewa Aset: dalam hal pembayaran sewa aset agar pemerintah menekankan pembayaran di awal tahun, bukan di akhir tahun, serta pemerintah daerah dalam hal merencanakan lelang aset di spot-spot strategis (contoh: Blok Laharan) dengan tetap mempertimbangkan dampak sosial dan politis, dan mendorong penilaian ulang harga sewa aset yang sudah berjalan.

## 24. BKPSDM

- a. Guna menjaga stabilitas kinerja organisasi, **DPRD Kota Probolinggo mendorong** Pemerintah Kota untuk segera melakukan pengisian JPT Pratama/Eselon II yang kosong termasuk posisi Sekretaris Daerah dengan mengoptimalkan implementasi Sistem Manajemen Talenta (SIMATA).
- b. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** kepada BKPSDM untuk memperketat pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap pegawai yang meninggalkan tempat tugas tanpa alasan yang sah selama jam kerja operasional. Hal ini bertujuan untuk menjamin optimalisasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- c. Guna memberikan kepastian hukum terkait mekanisme transisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** kepada BKPSDM untuk melakukan koordinasi intensif dan konsultasi berkelanjutan dengan Kemenpan-RB serta BKN Pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan kuota dan kesesuaian formasi CASN Pemerintah Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran 2026.

## 25. BAKESBANGPOL

- a. Terhadap rencana penyesuaian nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik dari sebesar Rp. 6.151,- menjadi Rp. 8.975,- per suara sah pada tahun 2027, **DPRD Kota Probolinggo menekankan** bahwa kenaikan tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas edukasi politik bagi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar fungsi partai politik dalam melakukan kaderisasi dan pendidikan demokrasi dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel.
- b. Mengingat besarnya alokasi hibah yang diberikan, **DPRD Kota Probolinggo menegaskan** bahwa setiap hasil evaluasi kinerja lapangan seperti efektivitas patroli dan harapan masyarakat wajib didokumentasikan secara resmi dan dilaporkan kepada mitra kerja terkait. Anggaran hibah harus berbanding lurus dengan kualitas koordinasi operasional di lapangan.

## 26. KECAMATAN

- a. Dalam rangka pematangan verifikasi Pra-Musrenbang, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** kepada pihak Kelurahan dan Kecamatan untuk melakukan screening yang lebih ketat di tingkat RT/RW sejak tahap awal. Hal ini bersifat imperatif untuk memastikan kejelasan status tanah/aset pemerintah sebelum usulan disetujui, guna menghindari munculnya proyek mangkrak akibat kendala legalitas lahan.
- b. Guna mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** penghapusan praktik perencanaan fisik yang bersifat parsial (sepotong-sepotong). Setiap usulan pembangunan, seperti pengaspalan jalan atau pavingisasi, harus direncanakan secara tuntas termasuk memperhatikan sistem drainasenya agar tidak memicu permasalahan baru di masyarakat atau penolakan warga akibat proyek yang tidak selesai secara fungsional.
- c. **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** kepada Pemerintah Kota Probolinggo untuk segera melakukan evaluasi teknis dan perbaikan atas kendala operasional (*error*) pada aplikasi SIPD. Stabilitas sistem sangat

diperlukan agar proses penginputan usulan kegiatan masyarakat tidak terhambat dan tetap terjaga akurasi datanya.

- d. Terkait penyelesaian tumpang tindih kewenangan, **DPRD Kota Probolinggo mendorong** koordinasi dan sinergitas yang lebih intensif antara Kecamatan/Kelurahan dengan Inspektorat, Dinas PUPR-PKP, DLH, Dishub, dan BPPKAD. Hal ini sebagai evaluasi atas rendahnya penyerapan anggaran PJU dan RTLH akibat pergeseran regulasi kewenangan di pertengahan tahun, agar kendala serupa tidak terulang di masa mendatang.
- e. **DPRD Kota Probolinggo mendesak** seluruh Camat untuk memformulasikan strategi percepatan eksekusi belanja modal dengan tata kelola administrasi yang lebih responsif. Target realisasi anggaran pada tahun mendatang ditetapkan minimal sebesar 90%, guna memastikan kemanfaatan anggaran pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara tepat waktu.
- f. Dalam rangka penanganan darurat di titik rawan banjir seperti Sungai Legundi, Nemetik/Pilang, dan Triwung Kidul, **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** kepada Perangkat Daerah teknis terkait untuk melakukan intervensi langsung. Penanganan harus mencakup penyediaan alat berat dan perbaikan bendungan (dam) yang secara teknis tidak dapat diakomodir hanya melalui kerja bakti warga atau anggaran stimulan kelurahan.
- g. Berkaitan dengan tindak lanjut fasilitas pengelolaan sampah, **DPRD Kota Probolinggo mendorong** Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera merealisasikan rencana alih fungsi tempat pembuangan sampah yang terbengkalai, salah satunya di Jalan Progo Kareng Lor, menjadi fasilitas *Refuse Derived Fuel* (RDF). Langkah ini dipandang mendesak sebagai solusi permanen atas tumpukan sampah yang belum terkelola dengan baik.
- h. Guna mendukung layanan keamanan berbasis masyarakat, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** pengalokasian anggaran pembangunan dan rehabilitasi Poskamling pada Perubahan APBD TA 2026. Hal ini didasari



atas banyaknya sarana pos keamanan yang sudah tidak layak pakai, padahal memiliki peran krusial dalam menjaga kondusivitas lingkungan.

- i. **DPRD Kota Probolinggo meminta** adanya mekanisme evaluasi dan pelaporan yang akuntabel terkait efektivitas dana hibah untuk fasilitasi Polisi RW. Program ini harus menunjukkan *output* dan *outcome* yang nyata dalam mitigasi kerawanan sosial, seperti pencegahan tawuran dan permasalahan kamtibmas lainnya di tengah Masyarakat.
- j. **DPRD Kota Probolinggo mengingatkan** bahwa kebijakan peningkatan honorarium bagi Ketua RT dan RW harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat serta penguatan fungsi koordinasi di tingkat bawah.
- k. **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** adanya intervensi kebijakan melalui alokasi anggaran yang spesifik dalam APBD untuk memfasilitasi, membina, dan mendukung program kerja Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dukungan ini diarahkan pada pengembangan destinasi wisata lokal seperti Pantai Permata, Sumber Mata Air Gayam, Kampung Anggur, serta destinasi potensial lainnya.

## **27. PUDAM**

Berdasarkan pencermatan DPRD Kota Probolinggo, tercatat adanya penurunan pada capaian laba dan setoran dividen dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) pada tahun 2025. Penurunan ini teridentifikasi sebagai akibat dari kondisi kahar (*force majeure*), yakni terjadinya insiden putus pipa transmisi di kawasan sumber mata air Ronggojalu yang menghentikan operasional selama 4 hari pada rentang periode April hingga Mei 2025. Selain itu, kinerja keuangan perusahaan juga terdampak secara signifikan oleh pelaksanaan proyek preservasi Jalan Soekarno-Hatta yang berlangsung selama 2 hingga 3 bulan. Proyek infrastruktur tersebut mengakibatkan kerusakan pada sejumlah jaringan pipa distribusi sekunder, yang berimbas langsung pada gangguan pelayanan dan berkurangnya potensi pendapatan perusahaan secara akumulatif.

Menyadari posisi vital PUDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD Kota Probolinggo mendesak manajemen PUDAM untuk segera menyusun manajemen risiko dan langkah mitigasi strategis guna mengantisipasi segala potensi gangguan operasional maupun keadaan darurat dalam tata kelola distribusi air minum di masa mendatang.

Selain penguatan aspek teknis di lapangan, DPRD Kota Probolinggo juga secara tegas menyarankan dilakukannya pembenahan dan penataan ulang pada sistem administrasi serta tata kelola keuangan internal perusahaan agar lebih transparan, efisien, dan profesional, sehingga target kontribusi pendapatan kepada pemerintah daerah dapat kembali optimal dan terjaga stabilitasnya.

## **28. BANK JATIM**

- a. Penerimaan dan pembayaran Pajak melalui Jconnect untuk mempermudah meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam peningkatan PAD, serta ASN harus menjadi *role model* pembayaran PBB.
- b. Dana Bergulir (Dagulir) Dana macet di Dinas Koperasi agar dari pihak Bank Jatim harus dilibatkan dalam penilaian kelayakan nasabah jika dana digulirkan kembali.

## **29. SECARA UMUM**

- a. DPRD Kota Probolinggo memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kota Probolinggo terhadap 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Secara khusus, DPRD Kota Probolinggo menyoroti tren positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama pada sasaran Meningkatnya Pemenuhan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan yang mengalami kenaikan sebesar 0,71 poin dibandingkan tahun 2024. Namun demikian, capaian positif tersebut berbanding terbalik dan terkesan kontradiktif dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2025 yang justru memburuk, yakni mengalami kenaikan sebesar 0,49 persen dari tahun 2024. Menyikapi hal ini, **DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan** agar penyelenggaraan

bursa kerja (*Job Fair*) dieksekusi secara lebih profesional dengan menyinkronkan keahlian pencari kerja dan kebutuhan industri. Lebih lanjut, mengingat minimnya porsi anggaran untuk fasilitasi ketenagakerjaan saat ini, **DPRD Kota Probolinggo mendorong** Pemerintah Daerah untuk menambah alokasi anggaran kegiatan tersebut pada periode mendatang guna mengoptimalkan persentase penyerapan tenaga kerja.

- b. Masih banyak sisa anggaran dan kegiatan di setiap OPD yang belum terealisasi, yang disebabkan karena kurangnya waktu, perubahan E-katalog dari V5 ke V6, gagal tender dan efisiensi anggaran. Maka **DPRD Kota Probolinggo menyarankan** agar setiap OPD harus mengkaji ulang dan lebih selektif terkait program/kegiatan yang bersifat prioritas.

## **I. KESIMPULAN**

Secara umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo menekankan agar Pemerintah Kota Probolinggo mengubah orientasi pembangunan dari sekadar pemenuhan target administratif menjadi pencapaian yang berdampak nyata dan berkualitas bagi masyarakat. Pada sektor ekonomi dan kesejahteraan, DPRD Kota Probolinggo mendesak optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalan potensi pajak, penerapan retribusi parkir elektronik, serta penyewaan aset strategis daerah yang selama ini belum maksimal. Pemulihan ekonomi perlu dipacu dengan memperbaiki iklim investasi dan menyelesaikan masalah dana bergulir yang macet. Sementara itu, penanganan masalah sosial dan kemiskinan harus digeser dari pendekatan bantuan sementara (karitatif) menuju program pemberdayaan kemandirian yang berbasis pada pemutakhiran data yang ketat.

Pada sektor infrastruktur dan lingkungan hidup, fokus Pemerintah Daerah harus beralih dari sekadar ketersediaan fisik menjadi peningkatan mutu dan pemeliharaan berkelanjutan, khususnya untuk jalan, sarana air bersih, dan sanitasi. DPRD Kota Probolinggo juga menyoroti perlunya penetapan target mitigasi bencana dan indikator lingkungan hidup yang lebih progresif dan realistis. Hal ini harus diikuti dengan eksekusi penanganan teknis di lapangan, seperti perbaikan fasilitas pengelolaan sampah, pemeliharaan ruang terbuka hijau, dan penanggulangan wilayah rawan banjir atau rob.

Terkait tata kelola birokrasi, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen kinerja (SAKIP) guna mengatasi tren penurunan akuntabilitas selama lima tahun terakhir. Akselerasi pelayanan publik harus diperkuat melalui integrasi data digital antar-Perangkat Daerah dan jaminan keamanan siber terpusat. Untuk menjaga stabilitas dan efisiensi roda pemerintahan, Pemerintah Kota didorong untuk segera mengisi kekosongan jabatan pimpinan, memperketat kedisiplinan aparatur, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di seluruh unit layanan.

Demikian Rekomendasi DPRD Kota Probolinggo yang dapat kami sampaikan, terhadap beberapa catatan dan rekomendasi strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024, semoga dijadikan dasar perbaikan dalam meningkatkan kebijakan publik pada masa yang akan datang.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO**

ttd

**DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DPRD  
KOTA PROBOLINGGO,**

**Drs. TEGUH BAGUS S., M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660605 199003 1 015